

# **PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP**

## **ALOKASI DANA DESA**

**(Studi Survei Pada Seluruh Desa di Kabupaten Dompu)**

Putri Ismiatun Khasanah

[Putriismiatun22@gmail.com](mailto:Putriismiatun22@gmail.com)

Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

### ***ABSTRACT***

*This study aims to analyze and proven the effect of Accountability And Transparency On Allocation Of Village Fund. Dompu Regency in the assessment of the Government Institution Performance Accountability System (SAKIP) still won the CC title. These problems are caused by the low level of accountability of LGs related to the goals or objectives set not results-oriented, the size of the success is unclear and not measurable, the program or activity is not in accordance with the objectives set, and the details of the activity are not in accordance with the intended purpose. The study method uses survey studies with primary data types and data collection techniques with questionnaires. The objects in this study were all villages in the regency totaling 72 villages. In this study a total of 30 samples were selected by the non-probability sampling method with convinience sampling techniques. This analysis of tis study used multiple linear regression analysis with the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Based on the analysis obtained the Accountability has a positive and significant effect on Allocation Of Village Funds, transparency has a positive and significant effect on Allocation Of Village Funds.*

**Keywords:** *Accountability, Transparency, Allocation Of Village Funds*

## **PENDAHULUAN**

Di Indonesia seiring dengan pelaksanaan Otonomi Daerah akuntansi sektor publik semakin pesat. Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keberadaan daerah otonom diharapkan pemerintah daerah mampu melaksanakan pemerintahan sendiri yang mengutamakan kepentingan masyarakat setempat terkait dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Dikutip dari Buku Saku Dana Desa, untuk mendanai kebutuhan daerah pemerintah daerah dapat mencari sumber pendapatan sendiri atau dikenal dengan Pendapatan Asli Daerah dan mendapatkan bantuan transfer dari pemerintah pusat yang dianggarkan berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN yang ditransfer oleh pemerintah pusat dan diterima oleh pemerintah Kabupaten/Kota secara proposional dengan besaran anggaran yang diperuntukkan Desa paling sedikit sebesar 10% kemudian di transfer secara bertahap disebut Alokasi Dana Desa.

Dalam PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pengelolaan alokasi dana desa harus berdasarkan asas Akuntabel serta Transparansi. Akuntabel serta Transparansi. Akuntabilitas yaitu kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengendalian sumber daya, pengelolaan serta pelaksanaan kebijakan. Transparansi yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa.

Dalam Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, desa diberikan kesempatan untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri dan pelaksanaan pembangunan dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Dalam hal ini peran pemerintah desa begitu besar oleh karena itu harus disertai pula dengan tanggungjawab yang besar sehingga pemerintah desa wajib mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaannya kepada pihak yang berhak mendapatkan pertanggungjawaban tersebut.

Realitas yang diamanatkan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ternyata belum dapat dilaksanakan dengan baik oleh beberapa oknum kepala desa di kabupaten dompu. Hal ini terbukti dengan adanya manta kepala desa Doro Peti, Kecamatan Pekat yang tidak mampu mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada warga desa saat rapat laporan pertanggungjawaban dengan masyarakat sehingga menyebabkan kepala desa Doro Peti terjerat kasus hukum atas dugaan korupsi sebesar 520 Juta. Selain itu hal serupa juga terjadi atas dugaan korupsi DD/ADD yang dilakukan mantan kepala desa Rababaka tahun 2016 kisaran sebesar 130 Juta, kepala desa Jala tahun 2018 kisaran sebesar 1,8 M dan kepala desa Mbawi tahun 2019 kisaran sekitar 1,5 M.

Kabupaten Dompu dalam penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) masih meraih predikat CC. Permasalahan tersebut disebabkan karena rendahnya tingkat akuntabilitas PEMDA terkait dengan tujuan atau sasaran yang ditetapkan tidak berorientasi pada hasil, ukuran keberhasilan tidak jelas serta tidak terukur, program atau kegiatan tidak sesuai dengan sasaran yang ditetapkan, dan rincian kegiatan tidak sesuai dengan maksud tujuan ([bpkp.go.id](http://bpkp.go.id)).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Gerryan, 2017) menemukan bahwa akuntabilitas keuangan tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah sedangkan transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah. Penelitian (Nurodin & Umami, 2017) menemukan bahwa akuntabilitas dan transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Penelitian selanjutnya (Putra & Rasmini, 2019) menyatakan bahwa akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. Penelitian (Sukmawati & Nurfitriani, 2019) menemukan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa sedangkan akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa.

Dari argumen diatas masih terdapat hasil penelitian yang tidak konsisten. Maka peneliti tertarik untuk kembali melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Alokasi Dana Desa (Studi Survei Pada Seluruh Desa di Kabupaten Dompu)”**. Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian (Nurodin & Umami, 2017), namun perbedaan penelitian terletak pada objek penelitian. Penelitian terdahulu terletak di Kecamatan Surade sedangkan penelitian ini di Kabupaten Dompu.

Penelitian ini diharapkan mampu memberi sumbangan secara teoritis, yaitu sebagai bahan pengembangan dan referensi pengetahuan khususnya dibidang akuntansi sektor publik terkait dengan akuntabilitas dan transparansi. Secara praktik, memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan bagi pemerintah untuk pengambilan keputusan dan kebijakan serta memperbaiki penyelenggaraan pemerintah desa kedepannya.

## **TINJAUAN LITERATUR DAN PERUMUSAN HIPOTESIS**

### ***Stewardship Theory***

Menurut Donaldson & Davis (1989, 1991) menyatakan bahwa teori stewardship adalah teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi, sehingga teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang dimana para eksekutif sebagai *steward* termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan prinsipal, selain itu perilaku *steward* tidak akan meninggalkan organisasinya sebab *steward* berusaha mencapai sasaran organisasinya.

*Selain itu, Stewardship theory* dibangun karena pada hakekatnya manusia memiliki sifat integritas dan kejujuran, dapat dipercaya dan bertanggungjawab. Kaitanya *Stewardship theory* dengan sektor publik ialah pemerintah desa selaku *steward* dinilai mampu bertanggungjawab terkait dengan hasil pelaksanaan kegiatan terhadap masyarakat yang berhak untuk mendapatkan pertanggungjawaban tersebut sehingga tujuan untuk mencapai sasaran organisasi dapat terwujud.

### **Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap alokasi dana desa**

Akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban. Artinya, mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan kepada yang mendelegasikan kewenangan dan mereka puas terhadap kinerja pelaksanaan kegiatannya (Ulum & Sofyani, 2016).

Akuntabilitas merupakan hal yang penting dalam alokasi dana desa karena semakin tinggi bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa kepada atasan dan

masyarakat maka akan diikuti pula dengan meningkatkannya kinerja penyelenggara pemerintah desa selain itu juga dengan adanya pertanggungjawaban dapat meminimalisir terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.

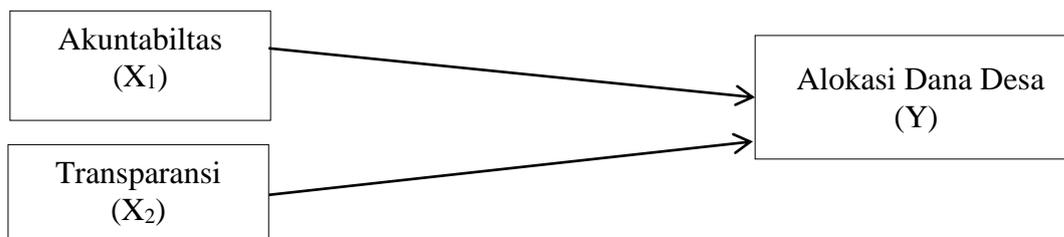
**H<sub>1</sub> : Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap alokasi dana desa.**

**Transparansi berpengaruh positif terhadap alokasi dana desa**

Transparansi berarti keterbukaan (openness) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi (Mardiasmo, 2004). Dalam hal ini pemerintah desa selaku pihak penyelenggara dan pemegang amanah maka harus dapat memastikan bahwa masyarakat memiliki akses untuk mendapatkan informasi yang seluas-luasnya terkait dengan penyelenggaraan pemerintah desa khususnya alokasi dana desa. Keterbukaan pemerintah desa kepada masyarakat akan meminimalisir terjadinya konflik antar kedua belah pihak dan dengan adanya keterbukaan pemerintah desa maka akan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

**H<sub>2</sub> : Transparansi berpengaruh positif terhadap alokasi dana desa.**

Model penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut:



## **METODE PENELITIAN**

### **Objek Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan objek penelitian yaitu Desa di Kabupaten Dompu dan subjek penelitian ini yaitu pemerintah desa yang terlibat langsung dalam alokasi dana desa yaitu Kepala Desa, Sekretaris dan Bendahara.

### **Jenis Data**

Data penelitian yang digunakan adalah data primer yaitu data penelitian yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari sumber pertama.

### **Teknik Pengambilan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh desa di Kabupaten Dompu berjumlah 72 desa. Sampel dipilih dengan menggunakan teknik *non-probability* sampling yang dilakukan dengan *convenience sampling*. *Convenience sampling* adalah pengambilan sampel berdasarkan kemudahan dan ketersediaan elemen. Sampel dari penelitian adalah 30 dengan teknik pengumpulan data kuesioner yang disebarkan ke seluruh responden masing-masing desa terpilih. (Kepala Desa, Sekretaris, dan Bendahara) sebanyak 90 responden.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Dalam memperoleh dan mengumpulkan data, peneliti menggunakan kuesioner. Kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang telah dirumuskan sebelumnya dimana responden akan mencatat jawaban mereka, biasanya dalam alternatif yang didefinisikan dengan jelas.

## **Definisi Operasional Variabel**

### **Variabel Dependen**

Penelitian ini menggunakan alokasi dana desa sebagai variabel dependen. alokasi dana desa merupakan dana yang di transfer oleh pemerintah pusat dan diterima pemerintah Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebesar 10% dari dana perimbangan pemerintah pusat dan daerah. Dalam PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014, indikator pengukuran alokasi dana desa yaitu Pengendalian penggunaan dana ADD, Ketepatan dalam pencapaian sasaran, dan Kemampuan tim pelaksana ADD

### **Variabel Independen**

#### **Akuntabilitas**

Akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban. Artinya, Mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan kepada yang mendelegasikan kewenangan dan mereka puas terhadap kinerja pelaksanaan kegiatannya (Ulum & Sofyani, 2016).

Dalam PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014, indikator pengukuran akuntabilitas yaitu Perencanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban.

#### **Transparansi (X<sub>2</sub>)**

Transparansi berarti keterbukaan (*opness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi (Mardiasmo, 2004). Indikator pengukuran transparansi yaitu Informatif, Keterbukaan, dan Pengungkapan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Objek/Subjek Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Alokasi Dana Desa. Studi Survei Pada Seluruh Desa di Kabupaten Dompu Dalam penelitian ini subjek yang digunakan adalah kepala desa, sekretaris, dan bendahara. Penyebaran kuesioner dimulai Senin, 14 Oktober 2019 s.d Senin, 14 November 2019. Sampel penelitian ini diambil sebanyak 30 Desa di Kabupaten Dompu. Total pengembalian kuisioner yang diperoleh peneliti yaitu sebanyak 90.

### Statistik Deskriptif

**Tabel 1**  
**Hasil Uji Deskriptif Variabel**

<b>Variabel</b>	<b>N</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Mean</b>	<b>Std. Deviation</b>
Akuntabilitas	90	58	69	64.58	2.694
Transparansi	90	11	15	12.49	1.052
ADD	90	12	15	13.19	1.235

Sumber: Data diolah, 2019

Tabel diatas, menunjukkan bahwa jumlah data yang digunakan sebanyak 90. Variabel Alokasi Dana Desa memiliki rata-rata sebesar 13.19 dengan nilai standar deviasi sebesar 1.235. Variabel Akuntabilitas memiliki nilai rata-rata sebesar 64,58 dengan

standar deviasi 2,694. Variabel Transparansi memiliki nilai rata-rata sebesar 12.49 dengan standar deviasi 1.052.

## Uji Validitas

**Tabel 2**  
**Hasil Uji Validitas**

Variabel	Item	$r_{hitung}$	$r_{tabel}$	Keterangan
Akuntabilitas	PE1	0,670	0,25	Valid
	PE2	0,492	0,25	Valid
	PE3	0,288	0,25	Valid
	PE4	0,584	0,25	Valid
	PL1	0,795	0,25	Valid
	PL2	0,775	0,25	Valid
	PL3	0,584	0,25	Valid
	PL4	0,788	0,25	Valid
	<b>PP1</b>	<b>0,047</b>	0,25	<b>Tidak Valid</b>
	PP2	0,788	0,25	Valid
	PP3	0,751	0,25	Valid
	<b>PP4</b>	<b>0,157</b>	0,25	<b>Tidak Valid</b>
	<b>PN1</b>	<b>0,047</b>	0,25	<b>Tidak Valid</b>
	<b>PN2</b>	<b>0,22</b>	0,25	<b>Tidak Valid</b>
<b>PN3</b>	<b>-0,031</b>	0,25	<b>Tidak Valid</b>	
Transparansi	TR1	0,809	0,25	Valid
	TR2	0,779	0,25	Valid
	TR3	0,779	0,25	Valid
Alokasi Dana Desa	ADD1	0,905	0,25	Valid
	ADD2	0,937	0,25	Valid
	ADD3	0,763	0,25	Valid

Sumber: Data diolah, 2019

Tabel diatas, menunjukkan bahwa masing-masing item pertanyaan variabel memiliki nilai  $r_{hitung} > 0,25$  sehingga item pertanyaan dinyatakan valid. Namun untuk

item pertanyaan variabel akuntabilitas PP1, PP4,PN1,PN2,PN3 memiliki  $r_{hitung} < 0,25$  sehingga item pertanyaan di buang.

### Uji Reliabilitas

**Tabel 3**  
**Uji Reliabilitas**

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
Akuntabilitas	0,783	Reliabel
Transparansi	0,754	Reliabel
Alokasi Dana Desa	0,842	Reliabel

Sumber: Data diolah, 2019

Tabel diatas, menunjukkan bahwa nilai Cronbach's Alpha dari semua variabel penelitian yaitu variabel Akuntabilitas, Transparansi, dan Alokasi Dana Desa  $> 0,6$ . Dengan demikian jawaban-jawaban responden dari variabel-variabel penelitian dinyatakan reliabel, sehingga kuesioner dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.

### Uji Normalitas

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Normalitas**

Asymp. Sig. (2-tailed)	Keterangan
0,200	Normal

Sumber: Data diolah, 2019

Tabel diatas, menunjukkan bahwa nilai Asymp. Sig ( $0,200 > 0,05$ ), maka data berdistribusi normal atau tersebar secara merata.

### Uji Multikolinieritas

**Tabel 5**  
**Hasil Uji Multikolinieritas**

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Akuntabilitas	0,950	1,052	Bebas Multikolinieritas
Transparansi	0,950	1,052	Bebas Multikolinieritas

Sumber: Data diolah, 2019

Tabel diatas, menunjukkan bahwa nilai tolerance adalah  $0,950 < 1$  dan nilai VIF (*Variance Inflation Factor*)  $< 10$ , maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung gejala multikolinieritas.

### Uji Heteroskedastisitas

**Tabel 6**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Variabel	sig	Keterangan
Akuntabilitas	0,061	Bebas Heteroskedastisitas
Transparansi	0,198	Bebas Heteroskedastisitas

Sumber: Data diolah, 2019

Tabel diatas, menunjukan bahwa nilai sig untuk variabel akuntabilitas sebesar 0,061 dan variabel transparansi sebesar 0,198. Dikarenakan nilai

*signifikansi* lebih besar dari tingkat signifikan  $\alpha = 5\%$ , maka dapat disimpulkan bahwa data tidak mengandung gejala heteroskedastisitas.

### Uji Hipotesis dan Analisis Data

**Tabel 7**  
**Hasil Uji Regresi Linier Berganda**

Variabel	Unstandardized	Sig
	Coefficients	
	B	
(Constant)	0,578	0,964
Akuntabilitas	0,168	0,000
Transparansi	0,373	0,001

Sumber: Data diolah, 2019

Dari tabel 4.12 menunjukkan bahwa hasil analisis persamaan regresi ganda adalah :

$$Y = 0,578 + 0,168X_1 + 0,373X_2$$

#### a. Uji Hipotesis 1 ( $H_1$ )

Berdasarkan tabel diatas, menunjukan variabel akuntabilitas memiliki koefisien regresi sebesar 0,168 artinya terdapat arah hubungan positif dan nilai p-value hasil uji-t dari variabel akuntabilitas sebesar 0,000. Dikarenakan nilai p-value lebih kecil dari tingkat signifikan  $\alpha = 5\%$  atau ( $0,000 < 0,05$ ), maka hipotesis diterima. Artinya akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi dana desa.

### b. Uji Hipotesis 1 (H<sub>2</sub>)

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan variabel transparansi memiliki koefisien regresi sebesar 0,373 artinya terdapat arah hubungan yang positif dan nilai p-value hasil uji-t dari variabel transparansi sebesar 0,001. Dikarenakan nilai p-value lebih kecil dari tingkat signifikan  $\alpha = 5\%$  atau ( $0,001 < 0,05$ ), maka hipotesis diterima. Artinya transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi dana desa.

### Uji Statistik F

**Tabel 8**  
**Uji F**

<b>F</b>	<b>Sig.</b>
22,650	0,000 <sup>b</sup>

Sumber: Data diolah, 2019

Tabel diatas, menunjukkan bahwa nilai p-value hasil uji F sebesar 0.000. Dikarenakan nilai sig lebih kecil dari tingkat signifikan  $\alpha = 5\%$  atau ( $0,000 < 0,05$ ), maka ada pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap alokasi dana desa secara simultan.

### Hasil Uji Koefisien Determinasi

**Tabel 8**  
**Koefisien Determinasi**

<b>R</b>	<b>R Square</b>	<b>Adjusted R Square</b>
0,585 <sup>a</sup>	0,342	0,327

Sumber: Data diolah, 2019

Tabel diatas, menunjukan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,327. Artinya variabel akuntabilitas dan transparansi mampu menjelaskan terhadap alokasi dana desa adalah sebesar 32,7%. Sisanya sebesar 67,3% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

## **PEMBAHASAAN**

### **Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Alokasi Dana Desa**

Hasil pengujian hipotesis menunjukan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi dana desa. maka  $H_1$  diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori stewardship yang didesain agar *steward* selaku pihak pemegang amanah dapat bertindak untuk kepentingan publik dan tidak termotivasi untuk bertindak sesuai dengan tujuan individu. Saat pemerintah desa selaku *steward* dapat mempertanggungjawabkan setiap hasil pelaksanaan alokasi dana desa kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan akan mengurangi adanya kesempatan praktik KKN.

Disamping itu, proses perencanaan dimulai dari sekretaris desa menyampaikan rancangan APBDesa yang akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah desa dan pembangunan desa. Dalam tahap penatausahaan bendahara desa telah mempertanggungjawabkan hasil yang melalui laporan pertanggungjawaban kepada kepala desa. Selain itu pemerintah desa telah menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota semester pertama paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan dan laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. Selain melakukan pelaporan,

pemerintah desa juga mempertanggungjawabkan realisasi pelaksanaan APBDesa yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan kepada Bupati/Walikota.

Dalam hal ini pemerintah desa Kabupaten Dompu telah menerapkan prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah desa dengan baik sesuai dengan PEMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014 mulai dari tahap perencanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

### **Pengaruh Transparansi Terhadap Alokasi Dana Desa**

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi dana desa. maka  $H_2$  diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori stewardship yang didesain agar *steward* selaku pihak pemegang amanah dapat bertindak untuk kepentingan publik dan tidak termotivasi untuk bertindak sesuai dengan tujuan individu. Dari teori ini menjelaskan dengan adanya keterbukaan pemerintah desa kepada masyarakat maka akan menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat. Sehingga peran keterbukaan sangat penting dalam alokasi dana desa.

Transparansi adalah pemberian pelayanan publik harus bersifat terbuka, mudah dan dapat di akses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. Salah unsur utama dalam pengelolaan keuangan yang baik adalah dengan adanya transparansi. Mengingat pemerintah saat memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, maka pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang

dikerjakannya. Pemerintah desa Kabupaten Dompu telah melaksanakan prinsip transparansi sesuai dengan peraturan PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014. Mulai dari kegiatan pencatatan kas masuk maupun kas keluar yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Selain itu juga pemerintah desa telah berupaya untuk menginformasikan laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBdesa baik kepada Bupati/Walikota melalui camat dan masyarakat.

## **KESIMPULAN, SARAN, DAN IMPLIKASI**

### **a. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi dana desa.
2. Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi dana desa.

### **b. Saran**

1. Penelitian selanjutnya disarankan menambah variabel independen lainnya karena sangat dimungkinkan variabel yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini dapat berpengaruh kuat terhadap alokasi dana desa seperti partisipasi, komitmen organisasi, dan lain sebagainya.
2. Disarankan untuk menambah BPD sebagai subjek penelitian.
3. Akuntabilitas dan transparansi pada alokasi dana desa di 30 Desa Kabupaten Dompu sudah baik oleh karena itu disarankan bahwa pemerintah desa untuk terus meningkatkan dan mempertahankan pencapaian ini sehingga kinerjanya semakin baik.

### **c. Implikasi**

#### 1. Aspek Ekonomi

Dampak penelitian ini, diharapkan dapat menambah tatanan ekonomi yang berkeadilan bagi masyarakat dompu baik dari segi pembangunan, pendidikan, dan ekonomi masyarakatnya.

#### 2. Aspek Sosial

Dampak dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan pemerintah dalam sosial kemasyarakatan terkait kemiskinan, pengangguran, dan masalah kriminal.

#### 3. Aspek Lingkungan

Dampak dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak mengenai bagaimana masyarakat dompu dalam hidup sehat dan lingkungan sehat

## DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto, N., 2007. *Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui EGovernment*. Malang: Bayumedia .
- BPKP. 2015. *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: Deputi IV BPKP.
- BPKP. 2018. *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat*. Bpkp.
- Diana, N & L, Sufiana., 2018. Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa sebagai Sarana Good Governance (Studi Pada Pemerintahan Desa Putat Lor dan Desa Putat Kidul Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang Tahun 2016). *Ilmiah Riset Akuntansi*. Volume 7, pp, 106-120.  
<http://riset.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/903>
- Dj. Widodo, R. B., Musikal, R., Puspawijaya, A. & Siregar, D. N. J., 2015. *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah.
- Gerryan, P., 2017. Pengaruh Akuntabilitas Keuangan, Pengawasan Keuangan Daerah, dan Transparansi Anggaran Terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu. *JOM fekon*, Volume 4, pp. 163-177.  
<https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFEKON/article/view/12170>
- Ghozali, I., 2009. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: BP Undip.
- Husein, Umar. 2011. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis Edisi 11*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kementerian Keuangan. 2017. *Buku Saku Dana Desa*. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Mardiasmo, 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo, 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Nazzaruddin , I. & Basuki, A. T., 2015. *Analisis Statistik Dengan SPSS*. Pertama, Cetakan Keempat, 2019 ed. Yogyakarta: Danisa Media.
- Nurodin, I. & Umami, R., 2017. Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmian Ilmu Ekonomi*, Volume 6, pp. 74-80.  
<http://eprints.ummi.ac.id/148/>
- Pratolo, S. & Jatimiko, B., 2017. *Akuntansi Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: LP3M.

- Putra, D. & Rasmini, K., 2019. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, Volume 28, pp. 135-158.  
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/46487/30197>
- Raharjo, E., 2007. Teori Agensi dan Teori Stewardship. *STIE Pelita Nusantara Semarang*, 2(T), pp. 39.  
[ejournal.stiepena.ac.id › index.php › article › download › 22 › 22](http://ejournal.stiepena.ac.id/index.php/article/download/22/22)
- Redaksi, 2018. *Suara NTB*, NTB: s.n. Diakses 22 Maret 2019.
- Republik Indonesia. 1998. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Asas Akuntabilitas.
- Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Otonomi Daerah.
- Republik Indonesia. 2007. Peraturan Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Republik Indonesia. 2014. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Sekaran, U. & Bougie, R., 2017. *Metode Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono, 2005. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmawati, F & Nurfitriani, A., 2019. Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Bisnis, Pasar Modal, dan UMKM*. Volume 2 (1), pp. 52-66.  
<https://ibn.e-journal.id/index.php/JIBPU/article/download/120/98/>
- Ulum, I. & Sofyani, H., 2016. *Akuntansi (Sektor) Publik*. Malang: Aditya Media Publishing.